I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah sekarang ini telah melahirkan sistem desentralisasi yang secara tidak langsung dapat mengoptimalkan pembangunan daerah dan jika proses pembangunan daerah mencapai nilai optimal, maka secara otomatis akan berdampak terhadap pembangunan nasional. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah di setiap daerah harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menyelenggarakan rumah tangganya, setiap daerah harus mandiri secara finansial untuk membiayai kehidupan rumah tangganya.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk mengelola sendiri daerahnya dan kekayaan sumber daya yang dimilikinya dengan sedikit intervensi pemerintah pusat dan diatur dalam peraturan daerah

serta tetap merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pendapatan Asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 157 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas; (1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; (2) dana perimbangan, dan; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksudkan sebagai dana untuk kegiatan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaran pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi anggaran belanja rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak

ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kepala daerah dalam mengelola daerahnya. Potensi yang besar dari suatu daerah, tidak dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan daerah tersebut apabila kepala daerah tidak dapat mengelola potensi daerahnya dengan benar. Sebaliknya, kurangnya potensi suatu daerah dapat ditutup dengan suatu strategi yang tepat untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan daerahnya.

Menurut Utama (2006: 6), mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di daerah dapat dilihat dari beberapa sudut pandang : *pertama*, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; *kedua*, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, latihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; *ketiga*, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Kemitraan menjadi sangat penting karena manajemen modern baik di sektor publik maupun privat (swasta) menuntut adanya keunggulan (mutu), daya saing antar lembaga, perspektif bahwa perusahaan yang berdiri sendiri akan sulit berkembang, dan tuntutan standar kinerja baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keuntungan yang didapatkan dari adanya kemitraan antara lain; (1) peningkatan efisiensi dan pembiayaan yang efektif; (2) meningkatkan kesempatan berinovasi; (3) perbaikan berkelanjutan termasuk peningkatan

kualitas produksi dan jasa; (4) peningkatan kinerja masing-masing mitra (*stakeholders)*; (5) saling menutupi kelemahan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra menjadi keunggulan dan keuntungan; (6) membuka akses yang lebih luas; (7) saling melakukan evaluasi; dan (8) memiliki standar operasional yang disepakati.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan retribusi parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Bandar Lampung. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari internet pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 19.45 WIB, Diskominfo Bandar Lampung menyatakan bahwa:

> “Sejak Herman terpilih sebagai walikota pada tahun 2010 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandar Lampung terus meningkat tajam dari tahun ke tahun. Sejak Herman baru menjabat yaitu pada tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung hanya Rp 86,69

miliar lebih. Angka tersebut dapat ditingkatkannya hingga 188% pada tahun 2011, yakni mencapai Rp 162,818 miliar lebih, dan pada 2012 PAD yang dihimpun lebih dari Rp 296 miliar. Masa positif pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya membuat Herman tak ragu memasang kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini hingga Rp 375 miliar".

Berdasarkan informasi tersebut, maka pada Gambar 1.1 mengenai grafik penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dari tahun 2010 sampai 2013, sebagai berikut :

Gambar 1.1. Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2010 – 2013

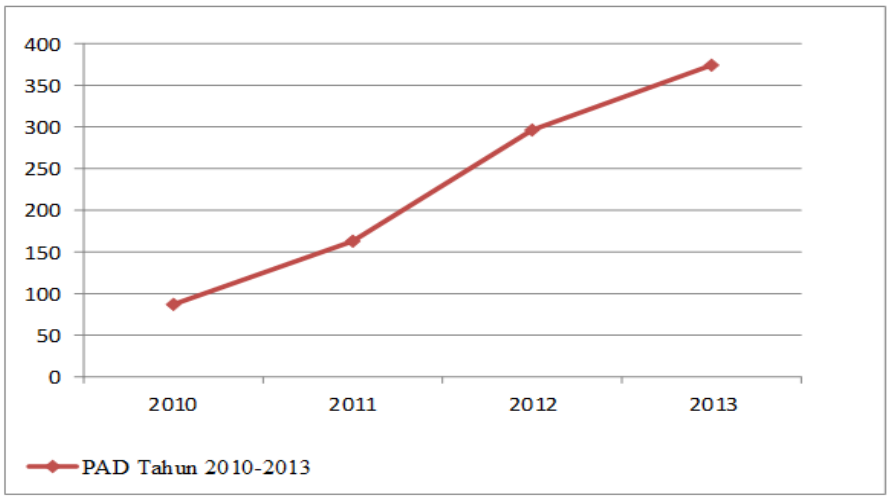

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh Drs. Hi. Herman H.N., M.M yang pernah dan lama menjadi pengelola keuangan dan pendapatan daerah, yakni di Biro Keuangan Provinsi Lampung serta Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Lampung. Beliau sangat paham bagaimana cara memaksimalkan potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi tidak melanggar undang-undang. Oleh sebab itu, pada saat terpilih menjadi walikota, langkah

awal yang dilakukannya adalah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat pemerintah Kota Bandar Lampung dapat membangun kota ini dan mensejahterakan rakyat di segala bidang. Beberapa tindakan yang diambil Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan rutin melakukan penertiban dan penurunan reklame yang melanggar aturan dan tidak membayar retribusi, serta peningkatan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Berdasarkan upaya ini, pemerintah kota membentuk tim perizinan yang sering merazia tempat hiburan, gudang, ruko, tower, dan bangunan lain untuk memastikan perizinannya sudah dilengkapi. Jika banyak bangunan tak berizin, hal ini bisa mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan. Pemerintah kota juga terus mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan penerimaan nonkonvensional. Tahap selanjutnya dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan target penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan.

Proses pembuatan suatu kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha melalui penyederhanaan sistem administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu hal yang paling penting. Pemerintah kota juga berusaha mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meningkatkan kesadaran membayar pajak, serta terus menyelenggarakan pelayanan prima. Cara

lainnya adalah dengan meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, pemerintah kota juga terus berusaha membenahi administrasi keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah kota selama tiga tahun berturut-turut, yakni 2010, 2011, dan 2012, menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung.

Berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 dan tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan berbagai upaya dari berbagai sektor. Salah satunya yaitu dari penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Siahaan (2010:620), terdapat jenis-jenis retribusi daerah, yaitu:

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi parkir merupakan salah satu dari berbagai macam retribusi daerah. Retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung sepakat melakukan kerjasama pengelolaan

retribusi parkir bersama pihak swasta, dalam hal ini pemerintah menunjuk PT Mitra Bina Persada sebagai relasi kerja dalam pengelolaan retribusi parkir.

PT Mitra Bina Persada merupakan perusahaan yang membidangi tentang pengelolaan lahan parkir yang dipercaya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengelola retribusi parkir khususnya di tepi jalan. Penyerahan pengelolaan perpakiran dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung kepada PT Mitra Bina Persada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan perparkiran di tepi jalan umum dan parkir khusus yang aman, nyaman bagi masyarakat dan untuk melakukan penataan perparkiran dengan segala hak dan kewajibannya. Terdapat dua pembagian sumber parkir yang didapat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Retribusi parkir yang dikelola oleh PT Mitra Bina Persada seperti parkir di tepi jalan dan pajak parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan seperti di mal-mal, restoran dan hotel.

Keterlibatan swasta dalam optimalisasi pelayanan publik, sangat mendukung dalam pencapaian tujuan besar yaitu *Good Governance*. Dalam konsep *Good Governance*, peran masyarakat dan sektor swasta menjadi sangat penting karena adanya perubahan paradigma pembangunan dengan meninjau ulang peran pemerintah dalam pembangunan. Menurut harian Radar Lampung, Kepala Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

> "Tahun 2012, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sebelum diserahkan ke PT Mitra Bina Persada sebesar Rp. 5,4 miliar hanya terealisasi Rp. 3,2 miliar atau 59,29 persen. Tahun 2013, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir sebesar Rp. 6 miliar hanya terealisasi Rp. 4,25 miliar. Direktur

> Utama PT Mitra Bina Persada Armalia Reny mengatakan bahwa tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir disebabkan adanya kendala, yakni pembangunan tiga *fly over* yang menyebabkan retribusi tidak mencapai target. Sepanjang pembangunan *fly over* itu kan ada beberapa kantong parkir sehingga omzet parkir kami berkurang, makanya kami tidak mencapai target," ungkap Reny". Tidak hanya itu, adanya pembangunan gedung di Pasar Smep Bandar Lampung juga menjadi salah satu kendala pihaknya, sebab pembangunan itu menyebabkan kantong parkir hilang".

Data yang tercatat pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, terdapat 19 wilayah parkir yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut maka pada Tabel 1.1, penulis akan menyajikan nama-nama lokasi parkir yang tersebar di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.1. Lokasi Parkir di Kota Bandar Lampung

No	Wilayah Parkir	Lokasi
1	1	Jalan Jenderal Suprapto
2	2	Jalan Pemuda
3	3	Jalan Pangkal Pinang
4	4	Jalan Bengkulu
5	5	Jalan Batu Sangkar
6	6	Pelataran Bambu Kuning Belakang dan Samping Kiri Kanan
7	7	Kompleks Pasar Bambu Kuning Plaza
8	8	Jalan Tanjung Pinang, Sibolga, Palembang 1 Dan Palembang 2, Jalan Baru, Jalan Padang, Jalan Kotaraja, Jalan Kartini (Dari Jalan Bengkulu Sampai Jalan Kotaraja)
9	9	Jalan Ahmad Yani, Jalan Wolter Manginsidi, Jalan Kartini (dari Jalan Wolter Manginsidi sampai dengan Jalan Imam Bonjol), Jalan S. Parman, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Kapten Tendean, Jalan Katamso, Jalan H. Agus Salim
10	10	Jalan Bukit Tinggi, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pisang, Jalan Durian, Jalan Manggis, Jalan Rambutan, Jalan

		Mangga, Jalan Duku, Jalan Kartini (eks. Dwiwarna) Kompleks Pasar Tamin
11	11A/11B	Jalan Soekarno-Hatta (dari Tugu Radin Intan sampai dengan Antasari), Jalan Ki Maja, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pajajaran, Jalan Z.A Pagar Alam, Jalan Sultan Agung, Kompleks PKOR Way Halim, Kompleks Pasar Way Halim, Kompleks Pasar Way Kandis
12	12	Jalan Radin Intan, Jalan Pemuda Bawah (dari Jalan Radin Intan sampai dengan Jalan Hayam Wuruk), Jalan Diponegoro, Jalan Jendral Sudirman (dari Jalan Radin Intan sampai dengan Jalan Ir. H. Juanda), Kompleks GOR Saburai dan Pasar Seni, Jalan Hayam Wuruk (dari Jalan Pemuda sampai dengan Jalan Yudistira)
13	13A	Kompleks Pasar Tugu, Kompleks Pasar Sukarame, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Hayam Wuruk
14	13B	Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Susilo, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Way Ngarip, Jalan Cendana, Jalan Way Sabu, Jalan K.H. Akhmad Dahlan, Jalan Jenderal Sudirman (dari Jalan Ir. H. Juanda sampai dengan Jalan Gatot Subroto), Kompleks Stadion Pahoman
15	14	Apotik Enggal
16	15	Jalan Ikan Bawal, Jalan Ikan Hiu sampai dengan perempatan Jalan Ikan Tongkol, Jalan Ikan Gurame, Jalan Ikan Hiu Blok C (dari Jalan Ikan Hiu sampai dengan Jalan Ikan Gurame)
17	16	Jalan Ikan Tongkol, Jalan Ikan Hiu (dari Jalan Ikan Tongkol sampai dengan Jalan Ikan Kakap), Jalan Ikan Bandeng, Jalan Ikan Belida
18	17	Jalan Ikan Kakap, Jalan Hasanudin, Jalan Ikan Kiter, Jalan Ikan Mas, Jalan Ikan Tenggiri, Jalan Patimura, Jalan Laksamana Malahayati (dari Jalan Ikan Bawal sampai dengan Pasar Cimeng), Kompleks Pasar Kangkung, Kompleks Pasar Gudang Lelang
19	18	Jalan Yos Sudarso (dari Jalan Laksamana Malahayati sampai dengan Terminal Sukaraja), Jalan Laksamana Malahayati sampai dengan Jalan Ikan Bawal, Jalan Mayor Salim Batubara, Kompleks Pasar Bumi Waras, Kompleks Santap Malam
20	19	Jalan Gatot Subroto, Jalan Yos Sudarso (dari Terminal Sukaraja sampai dengan Jalan Soekarno-Hatta), Jalan Bahari, Jalan Soekarno-Hatta (dari Jalan

		Antasari sampai dengan Tugu Perbatasan Lampung Selatan), Jalan M. Salim, Kompleks Pemandangan, Kompleks Pantai Harapan, Kompleks Pasar Panjang

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2013

Pada Tabel 1.1, menunjukkan terdapat 19 wilayah parkir yang tersebar di Kota Bandar Lampung dengan penyerapan tenaga parkir sebesar 593 juru parkir. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor parkir merupakan penerimaan retribusi daerah terbesar di Kota Bandar Lampung.

Menurut data pra riset yang diperoleh peneliti pada hari Senin 14 April 2014 pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir Kota Bandar Lampung tahun 2010 sampai 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Penerimaan Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2013

No	Tahun	Target (Rp)	Terealisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2010	Rp. 1.630.000.000	Rp. 1.520.247.000	93,26%
2	2011	Rp. 2.524.500.000	Rp. 2.276.978.500	90,19%
3	2012	Rp. 5.400.000.000	Rp. 3.201.264.000	59,28%
4	2013	Rp. 6.000.000.000	Rp. 4.252.000.100	70,87%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013

Berdasarkan pada Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa target setiap tahunnya bertambah namun persentase terealisasinya penerimaan setiap tahun tidak stabil bahkan mengalami penurunan. Pada tahun 2010 dan 2011, penerimaan retribusi parkir masih dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dengan

persentase pencapaian terealisasi sebesar 90,19% - 93,26%, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013, terjadi penurunan penerimaan retribusi parkir sebesar 59,28% - 70,87% ketika penerimaan retribusi parkir telah dipindah alihkan ke PT Mitra Bina Persada. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa kinerja PT Mitra Bina Persada yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan dalam menangani retribusi parkir di Kota Bandar Lampung tahun 2012 hingga 2013 belum maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah salah satu basis dari berhasilnya otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kekuatan dan bersifat otonom tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa ditopang oleh penegakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, resposiblitas, indepedensi, dan kesetaraan. *Good corporate governance* tampaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan sosial masyarakat. Hal ini ditunjukan dalam salah satu prinsip *good corporate governance* yang menyarankan keberpihakan kepada *stakeholders* dalam bentuk keterbukaan (akuntabilitas) perusahaan dalam laporan (penungkapan) termasuk didalamnya adalah pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (Hamid dalam Febrianti, 2004: 67).

Pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah, khususnya retribusi sektor parkir. Untuk memperoleh pendapatan yang

maksimal, maka PT Mitra Bina Persada Kota Bandar Lampung diharapkan dapat bekerja secara maksimal dalam memenuhi target yang ingin dicapai. Keberadaan perusahaan diharapkan dapat memacu derak roda perekonomian yang meliputi aktivitas produksi, finansial dan distribusi untuk membawa komunitas menuju taraf hidup yang lebih baik. Maka menurut Susanto (2009: 44), mengatakan bahwa harus ada keseimbangan keuntungan komunitas dengan keuntungan bisnis. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui Pola Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Pihak Swasta dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Pihak Swasta dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pola kemitraan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Pihak Swasta dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi keilmuan dalam proses belajar mengajar.

2. Secara Praktis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PT Mitra Bina Persada Kota Bandar Lampung dalam hal perwujudan kemitraan yang baik dalam pencapaian target retribusi parkir yang efektif dan efesien kedepannya.